

**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL, TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM  
PENGELOLAAN DANA BOS**

**(Studi Empiris Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Muara  
Pinang Kabupaten Empat Lawang)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Amelia Pitri**

**Nim : 222019115**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2023**

**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL, TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM  
PENGELOLAAN DANA BOS**

**(Studi Empiris Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Muara  
Pinang Kabupaten Empat Lawang)**

**Diajarkan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada  
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Amelia Pitri**

**Nim : 222019115**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Pitri  
NIM : 222019115  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Audit  
Judul Skripsi : Pengaruh *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BOS.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Juli 2023

  
Amelia Pitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang

**TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BOS.  
Nama : Amelia Pitri  
Nim : 222019115  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi  
Mata Kuliah : Audit

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, September 2023  
Pembimbing II,

Pembimbing I,



**Darmayanti S.E., A.K., M.M., CA**  
NIDN/NBM : 0219057901/1187172



**Saekarini Yuliachtri, S.E., Ak., M.Si**  
NIDN/NBM : 211078301/1187173

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Dr. Betri S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“ Memulai dengan penuh Keyakinan, Menjalankan dengan penuh Keikhlasan,  
Menyelesaikan dengan penuh Kebahagiaan ”*

*(Amelia Pitri)*

**Terucap syukur kupersembahkan kepada :**

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta bapak Arpan dan Almarhum ibu Hermini**
- ❖ **Kakak & Adiku**
- ❖ **Diriku Sendiri**
- ❖ **Keluarga Besar**
- ❖ **Dosen Pembimbing Skripsiku**
- ❖ **Almamater**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang Ucapan Terima kasih, peneliti sampaikan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan dan kedua orang tuaku, Bapak **Arpan** dan Almarhum Ibu **Hermini** yang sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian. Bab II Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan dan bab V kesimpulan.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan terutama orangtua Ayahanda saya **Bapak Arpan** dan **Ibunda saya Almarhum Ibu Hermini** serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu **Darmayanti. S.E.,M.Si** dan ibu **Saekarini Yuliachtri, SE.,Ak.,M.Si** yang telah membimbing dan memberi masukan guna

menyelesaikan skripsi ini, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Selain itu penulis ucapkan terimakasih juga kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak **Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M** beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak **Yudha Mahrom, S.E.,M.Si** beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak **Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,C.A** dan Ibu **Nina Sabrina, S.E.,M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Muhammadiyah Palembang.
4. **Nurul Hutami Ningsih S.E.,M.,S.i** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan dari semester awal sampai dengan sekarang.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya selama masa studi.
6. Seluruh staf dan karyawan di Jurusan Akuntansi bagian tata usaha, dan ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam semua proses yang diperlukan.
7. Sekolah Dasar (SD) Negeri di kecamatan Muara Pinang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya Penyusunan Skripsi ini.

8. Saudara-saudariku yang telah banyak membantu dan memberikan support dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Palembang, Agustus 2023  
Penulis

**Amelia Pitri**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1) Latar Belakang.....	1
2) Rumusan Masalah.....	14
3) Tujuan Penelitian.....	15
4) Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN</b>	
<b>HIPOTESIS .....</b>	<b>17</b>
1) Kajian Pustaka.....	17
1) Whistleblowing System.. .....	17
A. Pengertian Whistleblowing System.....	17
B. Indikator Whistleblowing System....	19

2) Sistem Pengendalian Internal.....	21
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal .....	21
b. Indikator Sistem Pengendalian Internal .....	23
3) Pencegahan Kecurangan .....	24
a. Pengertian Pencegahan Kecurangan .....	24
b. Indikator Pencegah Kecurangan.....	26
2) Penelitian Sebelumnya.....	30
3) Kerangka Pemikiran.....	36
4) Hipotesis.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Lokasi Penelitian.....	42
3. Operasional Penelitian.....	42
4. Populasi dan Sampel Penelitian.....	44
5. Data Yang Diperlukan.....	48
6. Metode Pengumpulan Data.....	48
7. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
1. Hasil Penelitian.....	59
2. Pembahasan... ..	90

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>94</b>
--	-----------

1. Kesimpulan.....	94
--------------------	----

2. Saran.....	94
---------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.I Survei Pendahuluan.....	13
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya.....	30
Tabel III.1 Daftar Sekolah Dasar (SD) Negeri di Muara Pinang.....	42
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel.....	43
Tabel III.3 Jumlah Responde.....	47
Tabel IV.1 Daftar Sekolah Dasar (SD) Negeri Yang Bersedia.....	59
Tabel IV.2 Jumlah Populasi Dianalisis.....	60
Tabel IV.3 Karakteristik Responden.....	61
Tabel IV.4 Hasil Pengujian Validitas <i>Whistleblowing System</i> .....	64
Tabel IV.5 Hasil Pengujian Validitas Sistem Pengendalian Internal.....	65
Tabel IV.6 Hasil Pengujian Validitasi Pencegahan Kecurangan.....	66
Tabel IV.7 Hasil Pengujian Realibitas.....	67
Tabel IV.8 Hasil Uji Deskriptif.....	68
Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Anomitas.....	69
Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Independensi.....	70
Tabel IV.11 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akses.....	71
Tabel IV.12 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Lingkungan Pengendalian.....	72
Tabel IV.13 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Penilaian Resiko.....	73
Tabel IV.14 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kegiatan Pengendalian	74

Tabel IV.15 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Informasi dan Komunikasi.....	75
Tabel IV.16 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Monitoring.....	76
Tabel IV.17 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Setruktur Pengendalian Internal yang baik.....	77
Tabel IV.18 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Aktivitas Pengendalian Yang Efektif.....	78
Tabel IV.19 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Meningkatkan Kultur Organisasi.....	79
Tabel IV.20 Hasil Uji Normalitas .....	82
Tabel IV.21 Hasil Uji Multikolinearita .....	83
Tabel IV.22 Hasil Uji Haterokedasitas .....	85
Tabel IV.23 Hasil Uji Regresi .....	86
Tabel IV.24 Hasil Koefisien Determinasi .....	87
Tabel IV.25 Hasil Uji Bersama-Sama .....	88
Tabel IV.26 Hasil Uji t Parsial .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	39
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas .....	81
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedassitas .....	84

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Hasil Kuesioner (Skala Interval)

Lampiran 3 Karakteristik Responden

Lampiran 4 Tabel Uji f

Lampiran 5 Tabel Uji t

Lampiran 6 Tabel Uji r

Lampiran 7 Hasil Output Spss

Lampiran 8 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian

Lampiran 10 Hasil Cek Plagiarisme

Lampiran 11 Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an

Lampiran 12 Fotocopy Sertifikat SPSS

Lampiran 13 Fotocopy Plagiarisme

Lampiran 14 Fotocopy Sertifikat SKPI

Lampiran 15 Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Amelia Putri / 222019115 / 2023 Pengaruh *Whistleblowing System* Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris Sekolah Dasar (SD) Negeri Di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada sekolah dasar di kecamatan muara pinang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, data yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan program *Statistic For Special Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan sedangkan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan secara persial.

**Kata Kunci : *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal Pencegahan Kecurangan.**



## **ABSTRACT**

***Amelia Pitri / 222019115 / 2023 The Effect of the Whistleblowing System on the Internal Control System on the Prevention of Fraud in the Management of BOS Funds (Empirical Study of Public Elementary Schools (SD) in Muara Pinang District, Empat Lawang Regency).***

*This study aims to determine the effect of the whistleblowing system, an internal control system on fraud prevention in elementary schools in the Muara Pinang sub-district. This type of research is associative research, the data used are primary and secondary data. Methods of data collection by means of interviews and questionnaires. Data analysis techniques use the Statistics For Special Science (SPSS) program. The results of the study show that the whistleblowing system, the internal control system, together influences fraud prevention. The internal control system has an effect on fraud prevention while the whistleblowing system has no effect on fraud prevention partially.*

*Keywords : Whistleblowing System, Internal Control System for Fraud Prevention.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bidang pendidikannya. Negara yang maju harus menjadikan pendidikan sebagai bidang unggulan. Satuan pendidikan Indonesia tentu saja mendapat angin segar dari kehadiran dana BOS, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan adanya dana BOS, sekolah dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembelajaran. Dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana, untuk besaran dana BOS Reguler yang disalurkan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu dihitung berdasarkan jumlah didik yang tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menunjang dana pendidikan bagi siswa di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai diterapkan sejak juli 2005 yang mana merupakan program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional dan non operasional bagi satuan pendidikan

dasar sebagai pelaksana wajib belajar 12 tahun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didistribusikan masing-masing sekolah setiap tiga bulan atau dalam priode triwulan oleh pemerintah. Namun, pada kenyataanya pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan priode yang telah ditentukan oleh pemerintah, karena dalam pendistribusianya serimh terjadi keterlambatan.

Keterlambatan pendistribusian disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan pendistribusian dari pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS di masing-masing daerah. Selain keterlambatan pendistribusian dana BOS juga sering mengalami pemersalahan penyelewengan penggunaan dana BOS karena minimnya partisipasi public dalam mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah menimbulkan banyaknya muncul kasus kecurangan (fraud) dalam pengelolaanya.

Bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan bantuan pemerintahan yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi no personalia bagi sekolah. Bantuan operasional sekolah didistribusikan pada masing-masing sekolah setiap tiga bulan atau dalam priode triwulan oleh pemerintah. Namun, pada kenyaanya tidak sesuai pada priode yang telah ditentukan oleh pemerintah karena sering terjadi keterlambatan seperti, pendistribusian dari pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manger BOS masing-masing daerah. Selaoiin pendistribusian dana BOS juga sering mengalami

permasalahan seperti penyelewengan penggunaan dan BOS dikarenakan minimnya partisipasi dan transparansi public dalam pengelolaan dana BOS sehingga menimbulkan adanya kecurangan. Kecurangan (*fraud*) adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. (Marshall B dan Paul, 2019:149).

*Fraud* (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Betri, 2020:17). Pelaku *fraud* biasanya adalah orang dalam perusahaan/organisasi dan umumnya adalah pegawai yang bekerja dengan baik, berpengalaman, mempunyai jabatan strategis dan dihormati (Bona, 2015:6).

Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah dari pada mengobati. Para ahli memperkirakan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang terjadi. Oleh karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahan (Betri, 2020:212). Pencegahan *fraud* yang berhasil harus melibatkan *soft control* yaitu menciptakan budaya (culture) yang sehat, jujur terbuka dan saling tolong menolong (Diaz, 2013:184).

Kebijakan anti *fraud* ditunjukkan agar perusahaan memiliki sistem pencegahan terjadinya penggelapan, dengan membuat sistem deteksi,

pemantauan dan sistem yang meninjau kebijakan di bidang sumber daya manusia (SDM) serta operasional (Betri, 2020:30).

*Whistleblowing System* adalah sistem dalam sebuah institusi yang memungkinkan *whistle blower* melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait (Juni, 2013:105). Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau pengungkapan perbuatan lain yang merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada oimoinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini dilakukan secara rahasia (*confidential*) (Theodorus, 2010:611). Banyak kasus tindak kecurangan terbongkar karena adanya orang yang berani “bernyanyi” (*whistle blower*), membuat pengaduan, atau membocorkan informasi (Valery, 2011:155).

Menurut Effendi (19) *Whistleblowing system* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi/perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang disampaikan oleh personel/badan hukum dari internal/eksternal kepada pemimpin perusahaan agar dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

*Whistleblowing System* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan yang diterapkan pada dinas PUPR provinsi Kalimantan timur, yang berarti semakin tinggi tingkat *whistleblowing system* diterapkan pada dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur maka tingkat pencegahan kecurangan juga tinggi sehingga akan meminimalisir terjadinya kecurangan. (Wardana, dkk (11)).

Walaupun pencegahan *fraud* sudah ada bahkan bekerja dengan baik oleh pelaku *fraud* akan tetapi pencegahan ini juga bisa digunakan sebagai penghambat yang kuat bagi orang yang berupaya untuk melaksanakan *fraud* (Silviana, 2020:78). Karena pencegahan terhadap akan terjadi suatu perbuatan curang akan lebih mudah dari pada mengatasi bila telah terjadi kecurangan (Betri, 2018:245). Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Novi (2018), Kadek (2017), Riri dan Lili (2015), Reza dkk (2020), Sumendep dkk (2019). Komang dan Desak (2020), Christi (2018), dimana hasil penelitian menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan sehingga dapat menciptakan organisasi yang baik. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chairul (2020) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek (2017), Kadek W (2017), I Made (2017), Anitaria (2019), Komang dan Desak (2020), hasil penelitian menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga semakin tinggi pencegahan *fraud*.

Sebaliknya semakin rendah tingkat upaya penerapan whistleblowing maka semakin rendah tingkat pencegahan fraud. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chairul (2020) bahwa whistleblowing tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Sistem Pengendalian Internal pada organisasi dibutuhkan untuk melindungi aset dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Pada institusi pemerintahan dikenal adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, pengertian sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam lingkungan pemerintahan, SPI dapat digunakan dalam setiap instansi baik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Dalam penelitian ini, instansi yang akan diambil sebagai subjek penelitian adalah instansi pendidikan berupa sekolah dengan objek penelitian adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah. Sekolah adalah salah satu sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter baik dan intelektual. Sekolah sebagai lembaga pendidikan

memiliki standar minimal sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi. Yang termasuk dalam sekolah diatur dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2020 Pasal 1. Dalam permendikbud ini, yang termasuk sekolah adalah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sistem pengendalian internal menurut Sujarweni (22), sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan. Selain itu, definisi sistem pengendalian internal menurut Herman (6), sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen organisasi, karena hal tersebut dapat membantu menjaga aset yang dimiliki oleh organisasi, keuangan dan manajerial dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di organisasi, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Fenomena yang terjadi Empat Lawang - Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Empat Lawang, hari ini Senin 6 Juni 2022 Jam 10:00 WIB, melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar melakukan pemeriksaan aset sekolah di SD Negeri 01 Kecamatan Muara Pinang Empat Lawang Sumatera Selatan, Senin (6/06/2022). Pemeriksaan dilakukan keseluruhan tingkat Sekolah SD Negeri, SMP Negeri di Seluruh Kecamatan Muara Pinang yang dilakukan secara bertahap selama tiga hari. Suhaida, S.Sos. Kepala bidang Sekolah Dasar saat di konfirmasi



menyampaikan, "kami di utus oleh atasan oleh Sekretaris Daerah Empat Lawang karena barang-barang yang ada di sekolah baik itu dari tingkat SD sampai SMP, kalau memang barangnya sudah direlak atau dihapus karena mengikat harus sudah tercatat banyak, kami di perintahkan oleh kepala dinas, saya dan teman-teman dari bidang aset terjun kesekolah hari ini secara langsung bertahap selama tiga hari," tutupnya. Kegiatan ini di hadiri kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Empat Lawang melalui kepala bidang SD Suhaida, S.Sos, Fetiya Nasution Kasubag bagian Aset Dinas Pendidikan Empat Lawang, Sahril Staf Dinas Pendidikan Empat Lawang, Gilang STAF Dinas Pendidikan Empat Lawang dan di sambut baik oleh Komarudin, S.Pd, MM beserta seluruh staf sekolah SD Negeri 01 Muara Pinang. (Suarasindo.com).

Fenomena yang terjadi di Empat Lawang Sumatera Selatan Sistem Pengendalian Internal Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Provinsi Sumatera Selatan soroti penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2020 di Kabupaten Empat Lawang di indikasi ada penyalahgunaan dan penyimpangan. Semua sekolah yang menerima dana BOS secara prinsip di duga menyalahi aturan khususnya penggunaan dana BOS reguler di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga diindikasi adanya penyalahgunaan dana atau dugaan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Ada sejumlah hal yang prinsip menyalahi aturan berdasarkan hasil pengamatan kami selaku Lembaga KPK, salah satunya sekolah yang menerima dana BOS bisa saja

tidak membuat berita acara revisi atas perubahan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) atas pengalihan belanja barang jasa dan kebutuhan lainnya. Kondisi ini mengakibatkan realisasi belanja modal dan belanja barang tidak dapat diukur dan diketahui secara pasti karena perubahannya tidak disertai berita secara perubahan RKAS dan revisi RKAS per triwulannya.

Kemudian mengenai bendahara sekolah tidak sesuai dengan ketentuan, diduga tim BOS banyak yang tidak difungsikan. Sekolah menunjuk bendahara untuk mengurus dana BOS, namun bendahara tidak mengetahui dana BOS, faktanya demikian lalu mengapa hal tersebut menjadi sorotan karena kurangnya pengawasan secara langsung dari berbagai pihak. Setelah kita pelajari dari RKAS banyak item kegiatan di tahun pandemic 2020 yang kami duga fiktif dan mark up anggaran. Ini akan kita laporkan kepada aparat penegak hukum karena ini pidana dan kami akan laporkan ke penegak hukum berdasarkan hasil temuan seperti sebelumnya sudah kita laporkan dugaan penyimpangan dana BOS di tingkat Sekolah Dasar (SD). (Empat Lawang Info).

Fenomena yang terjadi lapangan Empat Lawang – Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Provinsi Sumatera Selatan, laporka adanya dugaan korupsi dana anggaran pembiayaan belanja Negara biaya operasional sekolah (APBN BOS) di wilayah kecamatan muara pinang kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Selasa (27/01/2021). Informasi ini disampaikan oleh Diswater Lembaga KPK

dari ruangan Provinsi Sumatera Selatan Ali Muap melalui anggotanya Yulizar bersama rekan saat keluar dari ruangan Pidkor Polres Empat Lawang Sore tadi. “Ya hari ini kami Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi berdasarkan hasil di lapangan, kami melaporkan adanya dugaan tindakan korupsi terkait pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2020, di beberapa Sekolah Dasar (SD) yang berada di kecamatan Muara Pinang, karena ini tahun dimana adanya bencana covid19 yang mana menurut kami ditanahun itu sudah mulai belajar daring atau belajar dirumah namun ada beberapa anggaran masih jalan sedangkan tidak boleh sebab menimbulkan kerumunan” Papar Yulizar. Sambungnya, selain itu ada beberapa item lagi yang kita laporkan terkait penggunaan dana BOS. “Tapi yang jelas, laporan ini sudah kita memasukan dan akan kita kawal, kendati demikian semua kita serahkan ke pihak aparat penegak hukum dan kami percayakan sepenuhnya kepada Pidkor Polres Empat Lawang,” ia mengucapkan terimakasih kepada pihak aparat penegak hukum sudah menerima dan menanggapi laporan kami dan berharap laporanya dapat segera ditanggapi dan ditindak lanjuti tanpa tebang pilih. (Empatlawang.com).

Kasus lainnya kejaksaan Negeri (kejar) kota bogor menetapkan kontraktor berinsial JRR sebagai tersangka pada kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp 17,1 miliar. JRR di duga telah melakukan penyelewengan dana BOS dalam bentuk pengadaan dan penggandaan kertas ujian untuk SD sekota bogor. “pada hari ini tanggal 13 juli 2020,

kami beserta tim penyelidik pidana (Pidana Khusus) telah menetapkan tersangka bernama JRR, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi tentang penyimpangan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)". Kata kepala kejaksaan negeri (kejar) kota bogor bambang menyebut, JRR merupakan pihak ketiga atau kontraktor yang ditunjuk oleh kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang anggotanya merupakan kepala sekolah dasar sekota bogor. Untuk mengelola kertas ujian untuk SD sekota bogor. Sehingga timbul penggutan biaya kepada siswa sebagai syarat untuk ikut ujian, baik UTS,UAS,UN, maupun Tryout. Kegiatan dugaan penyelewengan dana BOS tersebut dilakukan tersangka pada tahun ajaran 2017-2019. Penyelewengan dana BOS tersebut dilakukan pada kegiatan ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), tryout ujian kenaikan kelas serta ujian sekolah dasar (SD) sekota bogor. (news.detik.com).

Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mencium kasus pelanggaran penggunaan dana bantuan sekolah (BOS) madrasah di Nusa Tenggara Barat (NTB) diproses secara tertutup di kantor polda NTB. Pengelolaan dan BOS madrasa menjadi praktik maladministratif yang melibatkan madrasah di NTB. Mereka memainkan dana BOS secara berjamaah, ungkap coordinator JPPI Ubaid Matraji saat dihubungi media Indonesia, minggu (29/9). Pernyataan itu menyusul adanya dengan pelanggaran penggunaan dana bos secara berjamaah oleh 2.256 madrasah di Provinsi NTB pada 2018. Ubaid Mutraji menyatakan dana BOS

madrasah senilai 200 miliar digelontorkan kemenag langsung ke rekening 2.256 sekolah madrasah NTB. Hal ini sesuai dengan keputusan direktur jenderal pendidikan islam Nomor 511 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2019, mengenai penyaluran dana BOS bagi madrasah. Hanya JPPI meminta kementerian Agama (Kemenag) bersikap proaktif mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana BOS madrasah. Paslanya lanjut Ubaid, Oknum pelaku mengoordinasi pembelian kebutuhan sekolah dengan dana BOS kepada satu penyedia. Menurutnya Polda NTB masih menyelidiki 28 orang dari kemenag tentang dengan korupsi itu ([mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com))

Berdasarkan uraian di atas, masih banyak kasus penyelewengan pada pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh kepala sekolah. Untuk itu khususnya kepala sekolah dituntut untuk menjadi panutan atau pimpinan yang memberi contoh yang baik. Dari kasus tersebut di dalam pengelolaan Dana Bos rata-rata secara umum terdapat masalah yang mana adanya budaya organisasi, proactive fraud audit dan whistleblowing system pada sekolah ataupun dinas masih rendah sehingga terjadinya tindakan atau pelanggaran dalam pengelolaan dana BOS yang merugikan Negara. Dari banyaknya kasus yang terjadi, maka dilakukan survey pendahuluan yang diambil dari 3 sampel Sekolah Dasar (SD) negeri yang mewakili terhadap Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

**Tabel 1.1**  
**Survei Pendahuluan**

Nama Sekolah Dasar (SD) Negeri Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang	Hasil Survei Pendahuluan
SD Negeri 4 Muara Pinang	Berdasarkan survei yang dilakukan di SDN 4 Muara Pinang bahwasanya sistem pengendalian internal telah diterapkan disekolah tersebut seperti halnya pelaporan penggunaan dana BOS pada kementrian. Namun pernah adanya keterlambatan dalam menyusun rencana kerja anggaran sekolah (RKAS). Karena keterlambatan tersebut terkendala di jaringan/internet sekolah yang tidak memadai akses aplikasi/sistem pengelolaan dana BOS. sehingga membuat keterlambatan pecairan dana BOS di sekolah tersebut.
SD Negeri 3 Muara Pinang	Berdasarkan survei yang dilakukan di SDN 3 Muara Pinang bahwa pihak kepala sekolah juga mengalami keterlambatan pendistribusian dana BOS dengan berorientasi dengan guru-guru sehingga kegiatan kerja diorganisasikan tim-tim, bukanya individu-individu. Kepala sekolah mengatakan dalam mengalami kendala seperti terlambat cair/keluar dana BOS tersebut ialah dengan menutupi kekurangan atau kebutuhan itu dengan meminjam uang sesama guru disekolah itu sehingga kegiatan belajar mengajar terus berjalan
SD Negeri 10 Muara Pinang	Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di SDN 10 Muara Pinang bahwasanya sekolah bersama-sama mengadakan rapat dan musyawarah dalam pengalokasian dana BOS yang keluar 4 bulan sekali agar tidak terjadi perselisihan dan transparansi. Sekolah juga pernah mengalami keterlambatan dalam pendistribusian dana BOS.

Berdasarkan informasi diatas yang diperoleh dari survey pendahuluan yang telah dilakukan diatas melalui wawancara bersama kepala sekolah di 3 Sekolah Dasar (SD) Negeri Kecamatan Muara Pinang adapun informasi yang diperoleh bahwa kepala sekolah menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana BOS belum terlaksana secara optimal sehingga banyak temuan-temuan terhadap tindak kecurangan terkait dengan dana BOS. hal ini terjadi karena proses pengelolaan dana lebih BOS mengutamakan, sistem pengendalian internal dapat dengan mudah dalam pengelolaan dana BOS karena kegiatan-kegiatan tersebut di musyawarahkan bersama. Sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya kecurangan serta pendistribusian yang baik pula agar tidak terjadi keterlambatan, kurang efektifnya transparansi sehingga informasi yang ada kurang relevan maupun akurat, dan *Whistleblowing system* sulit untuk diterapkan karena kurangnya anonimitas dimana adanya rasa takut dalam melaporkan tindakan kecurangan yang telah terjadi.

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Bos (studi empiris pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal (Studi Empiris Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang).
2. Bagaimana pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS.
3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui Pengaruh *Whistleblowing system*, Sistem Pengendalian Intenal, Dan Budaya Organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Bos.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis secara empiris tentang pengaruh Budaya Organisasi, Transparansi dan *Whistleblowing System* terhadap pencegahab fraud dalam pengelolaan dana BOS.



## 2. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat bagi sekolah-sekolah di kecamatan muara pinang dalam memahami dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Budaya Organisasi, Transparansi, dan *Whistleblowing System* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS.

## 3. Bagi Almamater

Manfaat yang diperoleh bagi Universitas Muhammadiyah Palembang adalah dengan adanya laporan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Universitas dan hasil penelitian dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topic relative sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvin A. Arens (2016). *Auditing And Assurance Service*. Inggris : An Integrated Approach
- Armando Tungga Atmadja, Komang Adi Kurniawan Saputra Dan Daniel T.H. Manurung (2019). *Proactive Fraud Audit, Whistleblowing And Cultural Implementation Of Tri Hita Karena For Fraud Prevantion*. European Research Studies Journal. Volume Xxii, Issue 3.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2017). *Akuntansi Keperilakuan : Akuntansi Multiparadigma*. Edisi 3. Jakarta : Selemba Empat
- Betri. (2020). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi Satu Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Buchari Alma. (2017). *Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Chairul Wahyudi. (2020). *Pengaruh Ethical Leadership, Pengendalian Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Asset Missappropriation Dengan Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi*. Prosiding Seminar Nasional Pakar ISSN (P) : 2615-258 (E) : 2615-3343.
- Christi Novita Lorensa, Syaikhul Fallah Dan Mariolin A. Sanggenafa. (2018). *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Komponen Setruktur Pengendalian Intenal Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah 13 (2) : 13-25.
- Diaz Priantara. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta : Mitra Wacanamedia.
- Edy Sutrisno. (2018). *Budaya Organisasi*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Hari Silaksono. (2015). *Budaya Organisasi Dan Kinerja*. Yogyakarta : Deepublish.
- I Made Indra Dwi Putra Sustawan, Edy Sujana, Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2017). *Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan BOS*. E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 7 No 2.
- Juni Sjafrien Jahja. (2013). *Prinsip Kehati Hatian Dalam Membrantas Manajemen Koruptuf Pada Pemerintah Dan Koperasi*. Jakarta : Visimedia
- Kadek Widiyarta, Nyoman Trisna Herawati Dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi,*

*Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa.* E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol : 8 No : 2

Kholilah. (2018). *Perilaku Organisasi*. Palembang : Noer Fikri Offest.

Komang Candra Retalisni Anandya Dan Desak Nyoman Sri Werastuti. (2020). *Pengaruh Budaya Whistleblowing Dan MOralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali.* Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humaika, 10 (2) : 2599-2651.

Mardi. (2014). *Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda.* *Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 535-547.

Marshal B. Romney Dan Paul John Steinbart. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi.* Jakarta : Selemba Empat.

Ni Putu Gaurina, I Gusti Ayu Purnamawati Dan Ananwikrama Tungga Atmadja. (2017). *Perngaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Etis Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud.* E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol:8 No: 2.

Ni Kadek Dwi Ariastini, Gede Adi Yuniarta Dan Putu Sukma Kurniawan (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dan BOS SeKabupaten Klungkung.* Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia. Vol. 1, No 3.

Priscilla Sumendep, Dkk (2019). *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening.* Jurnal Prosiding. ISSN 2651-2584.

Riri Zelmianti Dan Lili Anita. (2015). *Pengaruh Budaya Dan Peran Auditor Internal Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening.* Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Vol.8 : 67-76.

Silviana Pebruary, Dkk. (2020). *Pencegahan Fraud Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.* Yogyakarta : Strat Up.

- Soemarso S.R. (2018) *Etika Dalam Bisnis & Profesi Akuntan Dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta : Selemba Empat.
- Theodurus M. Tuanakotta. (2010). *Akuntansi Forensic & Audit Investigatif*. Edisi 2. Jakarta : Selemba Empat.
- Tobari (2015). *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan*. Yogyakarta : Deepublish.
- V. Wiratna Sujarweni. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Akses.
- Valery G. Kumaat. (2011). *Internal Audit*. Jakarta : Erlangga.
- Wibowo. (2018) *Budaya Organisasi : Sebuah Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang*. Edisi Kedua. Depok : Rajawali Pers.
- Zimbelman, Mark F (2014). *Akuntansi Forensik*. Keempat, Jakarta : Penerbit Selemba Empat.